

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK
PIDANA KORUPSI (*WHISTLEBLOWER*) DALAM PUTUSAN
PENGADILAN TINGGIP BANDUNG NOMOR:
32/PID.TPK/2022/PT BDG**

TESIS

Oleh:

**MUHAMAD MAU LANA YUSUP
NIM : 2002190100**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK
PIDANA KORUPSI (*WHISTLEBLOWER*) DALAM PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR:
32/PID.TPK/2022/PT BDG**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**MUHAMAD MAULANA YUSUP
NIM : 2002190100**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Muhamad Maulana Yusup
NIM : 2002190100
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 32/Pid.TPK/2022/PT Bdg”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 23 Nopember 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhamad Maulana Yusup
NIM. 2002190100



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK
PIDANA KORUPSI (*WHISTLEBLOWER*) DALAM PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR:
32/PID.TPK/2022/PT BDG

Oleh :

Nama : Muhamad Maulana Yusup
NIM : 2002190100
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Pascasarjana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 23 Nopember 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M. Hum.
NIDN. 0304026301

Pembimbing II

Dr. Drs. Tatok Sunjiarto, S.H., M.H., M.TL.
NIDN. 8931720021

Ketua

Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Wiwik Sriwidiarty, S.H., M.H.
NIDN. 0327096504

Direktur

Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA
NIDN. 0320116402




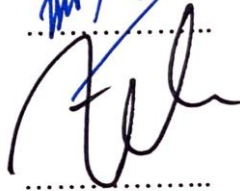

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 23 Nopember 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Muhamad Maulana Yusup
NIM : 2002190100
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI (WHISTLEBLOWER) DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR:32/PID.TPK/2022/PT BDG” oleh tim penguji yang terdiri

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M. Hum.	Ketua	
2. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.TL.	Anggota	
3. Dr. Djernih Sitanggang, Bc., I.P., S.H., M.H.	Anggota	

Jakarta, 23 Nopember 2023



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Muhamad Maulana Yusup
NIM : 2002190100
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblower*) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 32/Pid.TPK/2022/PT Bdg

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 23 Nopember 2023



Muhamad Maulana Yusup
NIM, 2002190100

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblower*) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 32/Pid.TPK/2022/PT Bdg dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para pembimbing, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing I sekaligus Penguji I, dan Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.TL selaku Pembimbing II sekaligus Penguji II, yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya tesis ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

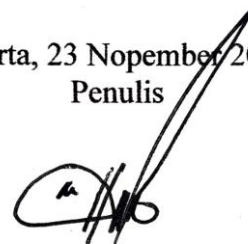
1. Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Dr. Dhaniswara K Harjono S.H., M.H., M.B.A., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Prof. Dr. dr. Bernadheta Nadeak, M.Pd., PA., selaku Direktur Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (UKI).
4. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI).
5. Dr. Djernih Sitanggang, Bc., I.P., S.H., M.H., selaku Penguji III.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya dalam hal pengumpulan data dan informasi dalam penulisan tesis ini, pimpinan dan sahabat-sahabat saya IPTU Tego Suprihatin selaku Dankie 6, IPDA Agus Pranoto selaku Danton 2, IPDA Muhamad Danial, S.H. / BRIPKA Rudy Haryanto selaku Danton/Anggota Pleton 3, seluruh keluarga besar Kompi 6 Sudbit Dalmas Ditsamapta Polda Metro Jaya dan Bapak Oloan Mulia Manik, S.H., M.H., C.L.A., selaku Praktisi Hukum, serta seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

Secara khusus, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua, Bapak Nanang Makmur dan Ibu Eli Hasmita, ayah mertua Bapak Yaya Sukarya, istri tercinta Melinda Khoerunnisa, anak-anak kebanggaan abang Maliq dan dede Mikha serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala doa, dukungan, bantuan dan motivasinya selama ini, yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun demikian penulis mengharapkan kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta praktisi di bidang hukum, khususnya terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblower*)”.

Jakarta, 23 Nopember 2023
Penulis



Muhamad Maulana Yusup
NIM. 2002190100

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan Praktis.....	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konsep	36
F. Metode Penelitian	40
1. Spesifikasi Penelitian	40
2. Pendekatan Penelitian	40
3. Jenis dan Sumber Data	41
4. Teknik Pengumpulan Data	41
5. Teknik Analisis Data	42
6. Lokasi Penelitian	43
7. Orisinalitas Penelitian	43
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	45
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	45

1.	Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.....	46
2.	Teori Perlindungan Hukum.....	47
3.	Pentingnya Perlindungan Hukum.....	49
4.	Cara Mendapat Perlindungan Hukum.....	51
B.	Tindak Pidana Korupsi	52
1.	Bentuk Bentuk Pidana Korupsi.....	56
2.	Korupsi dalam UU RI	58
3.	Unsur unsur Tindak Pidana Korupsi	69
C.	Saksi Pelapor Dalam Peradilan Tindak Pidana	71
1.	Whistleblower	74
2.	Justice Collaborator.....	75
D.	Tinjauan Umum Tentang Whistleblower	79
BAB III	: ANALISIS YURUDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PUTUSAN NOMOR: 32/PID.TPK/2022/PT BDG	82
A.	Kasus Pidana Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor	82
1.	Kasus Posisi.....	82
2.	Identitas Terdakwa	83
3.	Dakwaan dan Tuntutan.....	85
4.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	105
5.	Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg.....	109
6.	Permohonan Banding	118
7.	Mengadili.	123
B.	Analisis Dakwaan	125
1.	Menyebutkan Waktu dan Tempat Tindak Pidana itu dilakukan	128
2.	Pasal Delik yang dilanggar.....	128
3.	Alat Bukti	130
C.	Analisis Tuntutan	131
D.	Analisis Putusan	133
E.	Analisis Kasus	139

BAB IV	: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI (WHISTLEBLOWER)	140
	A. Proses Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi	140
	B. Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi	148
	C. Fakta - fakta kasus Nurhayati hingga status tersangka dihentikan	156
BAB V	: PENUTUP	162
	A. Kesimpulan	162
	B. Saran	164
DAFTAR PUSTAKA.....		166
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		172



ABSTRAK

Judul Tesis: Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblower*) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 32/Pid.Tpk/2022/PT Bdg.

Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor pada tindak pidana korupsi merupakan bagian dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena saksi dalam perkara korupsi dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana yang sangat merugikan negara, sehingga negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya, akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mau / enggan menjadi saksi, dengan alasan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas khususnya terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi. Peran dari seseorang yang melaporkan tindakan di sekitarnya, terutama di dalam instansi tempat dia bekerja, atau yang disebut sebagai *whistleblower* sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu yang menganalisis hukum secara tertulis, bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama sementara data lapangan melalui wawancara dijadikan data pendukung/pelengkap. Analisis Data, setelah semua data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), serta data pendukung dari hasil wawancara, dilakukan pemeriksaan dan evaluasi untuk mengetahui validitasnya, kemudian data dikelompokkan atas data sejenis. Data kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, sistematis menggunakan metode deduktif dan induktif.

Terhadap Saksi Pelapor tindak pidana korupsi (*Whistleblower*) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 32/Pid.Tpk/2022/PT Bdg berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mendapatkan perlindungan hukum, akan tetapi kurang maksimal karena sebelumnya pelapor telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik tanpa adanya alat bukti yang kuat. Oleh karena itu, *whistle blowing system* harus terus dibenahi mulai dari aturan dan implementasinya, agar perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi (*Whistleblower*) dapat terjamin.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Whistleblower, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Thesis Title: Legal Protection for Corruption Crime Reporters Witness (Whistleblower) in Bandung High Court Decision Number: 32/Pid.Tpk/2022/PT Bdg.

Legal protection for witnesses who report corruption is part of the protection of human rights, because witnesses in corruption cases are considered part of the community to reveal crimes that are very detrimental to the state, so that the state has an obligation to protect the human rights of its citizens. but many people do not want / are reluctant to become witnesses, on the grounds that there is no clear legal protection, especially for witnesses who report corruption. The role of someone who reports actions around him, especially in the agency where he works, or what is known as a whistleblower is very important in efforts to eradicate corruption in Indonesia.

The approach method used in this study is normative juridical research, which analyzes written law, library materials and document studies are used as the main material while field data through interviews is used as supporting/complementary data. Data analysis, after all secondary data has been obtained through library research, as well as supporting data from interviews, an examination and evaluation is carried out to determine its validity, then the data is grouped into similar data. Qualitative data is interpreted juridically, logically, systematically using deductive and inductive methods.

For Corruption Crime Reporters Witness (Whistleblower) in the Bandung Number: 32/Pid.Tpk/2022/PT Bdg High Court Decision based on Law Number 13 of 2006 jo Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims have received legal protection, but not optimally because previously the whistleblower had been determined as a suspect by investigators without strong evidence. Therefore, the whistle blowing system must continue to be improved starting from the rules and their implementation, So that protection for whistleblowers of corruption crimes can be guaranteed.

Keywords: Legal protection, Whistleblower, Corruption.